TAJUK RENCANA

Memperpanjang Deretan Korupsi Kepala Daerah

FAKTA korupsi kepala daerah, bukan hal baru. Tahun 2022 yang belum genap enam bulan saja, sudah tertangkap tangan 6 kepala daerah. Paling mutakhir, mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap, dan ditahan bersama beberapa bawahannya. (KR, 4/6).

Sebelumnya terdapat 5 nama walikota/bupati yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang ditangkap 6 Januari 2022. Bupati Penajem Paser Utara Abdul Gafar Mas'ud (12/1), Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (18/1). Kemudian Bupati Bogor Ade Yasin (28/4) dam Walikota Ambon Richard Louhenapessy (13/5).

Praktik korupsi bupati/walikota bak kejahatan tanpa henti di negeri ini. Sebelum penangkapan ketiga bupati/walikota pada Januari 2022 di atas, situs kpk.go.id mengungkap sejak 2004 hingga 3 Januari tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak KPK. Namun Sekretaris Satuan Tugas Sekber Pungli RI, Irjen Pol Agung Makbul ketika berada di Meulaboh sebagaimana dikutip Antara (18/5) mengungkap data mencengangkan. Menurutnya, hingga Mei 2022 tercatat 323 bupati/walikota telah ditangkap dan ditahan terkait pidana korupsi.

Maka penangkapan Haryadi Suyuti telah memperpanjang deretan korupsi kepala daerah. Mereka ditindak, ditangkap lembaga antirasuah. Fakta memiriskan mengungkap, dalam realita sejatinya pejabat tidak takut korupsi (KR, 4/6). Buktinya, kasus bukan berkurang namun deretan panjang korupsi kepala daerah terus meningkat. Modus senada : korupsi proyek pengadaan barang dan jasa, suap untuk menerbitkan izin dan jual beli jabatan.

Tidak kalah menarik, dalih pengebabnya pun mirip : mengembalikan modal mengingat biaya politik yang tinggi. Menurut catatan ICW (7/2) mahalnya biaya politik karena politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Meski calon jarang berterus terang mengungkap biaya, kajian Litbang Kemendagri tahun 2015 mengungkap, untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota hingga gubernur membutuhkan biaya Rp 20 ñ 100 miliar. Sementara, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.

Maka ICW menyebut, sedikitnya ada tiga teori untuk antisipasi korupsi yang dilakukan kepala daerah. Pertama, perbaikan tata kelola partai mulai dari kaderisasi hingga pendanaan partai politik. Kedua, penguatan sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui keterbukaan informasi dan data yang mudah diakses masyarakat. Ketiga mendorong aparat penegak hukum berani menjerat partai politik apabila terbukti melakukan korupsi. Seperti halnya pemidanaan korupsi yang melibatkan korporasi.

Artinya, lepas dari jebakan demokrasi berbiaya tinggi harus dilakukan. Tetapi juga harus ada tekad dan perlu upaya memperbarui niat baik dari calon yang hendak maju kontestasi maupun partai pengusung. Tekadkan pencalonan adalah untuk menjadikan kekuasaan sebagai wakaf politik. Artinya, partai pengusung menempatkan kader terbaiknya, bukan mengejar kekuasaan sebagai *previlage*. Partai harus memahami telah mewakafkan kader terbaik yang semula milik satu golongan, menjadi milik dan melayani seluruh masyarakat.

Jika ini bisa dilakukan, kader akan bisa menjalankan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena ia pelayan masyarakat, bukan sekadar sebagai petugas partai. ❑

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya

Edi Tri Haryanto

MASIH ingat Ketika benteng Kraton Solo dirusak warga, hanya karena untuk kos atau bengkel? Apa maknanya bagi dunia arkeologi di Indonesia?

Pro-kontra dalam pemugaran cagar budaya kita memang masih terjadi. Memang akhir-akhir ini tampak bahwa pemugaran cagar budaya (bangunan maupun struktur) menunjukkan pada frekuensi yang lebih meningkat dari pada masa-masa sebelumnya.

Sebagai contoh pemugaran Gedung Grahadi Surabaya, pemugaran Candi Plaosan dan Candi Sewu, pemugaran benteng Lor-Wetan Kraton Ngayogyakarta dan lainnya. Fenomena ini dapat dijadikan dasar identifikasi mengenai munculnya kesadaran sejarah akan pentingnya nilai-nilai yang dikandung dalam cagar budaya. Masalahnya ialah, apakah pelaksanaan pemugaran yang banyak dilakukan akhir-akhir ini itu sudah benar-benar memenuhi persyaratan ilmiah dan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang ada?

Kepentingan Ilmiah.

Awalnya, pemugaran cagar budaya di Indonesia itu masih berorientasi pada bangunan-bangunan candi. Terjadi perdebatan sengit mengenai prinsip pemugaran antara Direktur Pertama Jawatan Purbakala dipimpin NJ Krom tahun 1910, yang diganti FDK Bosch (1916). Krom selalu menekankan pertimbangan ilmiah di dalam setiap pelaksanaan pemugaran. Di sisi lain Bosch menyatakan bahwa di samping kepentingan ilmiah, pemugaran juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Mengenai pembinaan kembali bangunan yang sudah rusak parah dan runtuh, Bosch merintis babak baru dan menyimpang lebih jauh dari garis-garis atau prinsip yang telah ditetapkan Krom. Pertentangan antara dua arkeolog yang tersohor itu berlangsung sampai bertahun-tahun. Krom sangat kecewa terhadap pemugaran Candi Mendut oleh JLA Brandes karena tidak cukup bahan dan bukti-bukti yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan. Krom juga mencela pemugaran candi induk Panataran yang dilakukan Perquin.

Menurutnya, bahwa suatu usaha melengkapkan bangunan candi yang sudah runtuh adalah soal ilmiah belaka dan karenanya cukup dilakukan di atas kertas. Melaksanakan rekonstruksi ini pada bangunannya sendiri atau tidak, sama

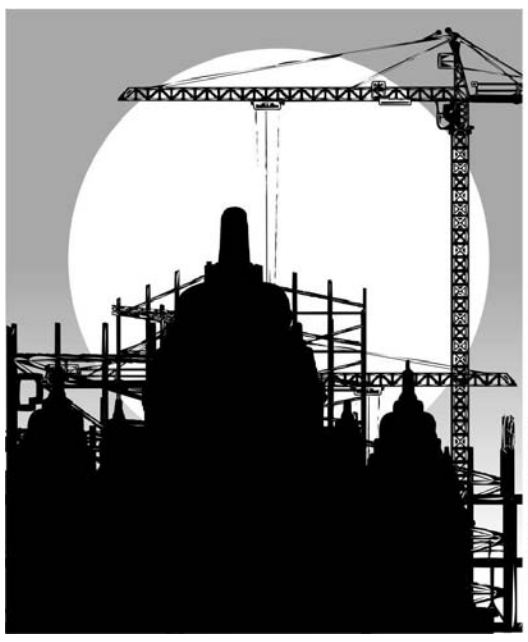
KR-JOKO SANTOSO

sekali tidak akan menambah atau mengurangi arti ilmiahnya. Bahkan pelaksanaan rekonstruksi menjadi anastylosis (pembinaan kembali/pemugaran) bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena ini berarti pemalsuan bukti sejarah.

Sebaliknya Bosch berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu pembinaan kembali atau pemugaran cagar budaya justru merupakan keharusan. Pengalamannya menunjukkan bahwa banyak sekali ditemukan kembali batu-batu reruntuhan candi yang hiasannya atau pahatannya nyata-nyata merupakan pelengkap atau bagian dari pada apa yang masih tegak

Soekmono, arkeolog yang jasanya sangat besar dalam pemugaran Candi Borobudur mengatakan, perlu disadari tidak satu peninggalan purbakala yang telah rusak atau runtuh masih menyimpan setiap unsurnya secara utuh. Maka demi tetap tegaknya bangunan yang dipugar itu tidak dapat dielakkan adanya penggantian dan penambahan.

Proses Sejarah

Satu paradigma yang belum dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya khususnya pasal 77 mengenai pemugaran yaitu kriteria proses sejarah. Bangunan cagar budaya yang rusak karena sejarah ada yang berpendapat tidak perlu dilakukan pemugaran. Sebab bagian yang rusak itu justru memberi kesan bahwa bangunan nampak kuna dan kerusakan itu dapat menuntun imajinasi seseorang untuk membayangkan bagaimana sesungguhnya bentuk lengkapnya.

Jangan lupa. Sejarah pemugaran bangunan cagar budaya di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya, baik itu bangunan-bangunan klasik seperti candi-candi maupun bangunan masa kolonial, akan dijumpai adanya tahapan-tahapan pembangunan. Hal ini dapat diketahui, ketika proses pembongkaran dilakukan ditemukan struktur yang bersifat *bareh* (rata). Dan sudah tentu itu pasti dilakukan penguasa.

Dengan demikian pemugaran yang dilakukan raja atau penguasa dibenarkan baik secara akademik maupun karena proses sejarah. Apalagi dalam pelaksanaan pemugaran tersebut berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ❑

) **Edi Tri Haryanto, arkeolog yang pernah memugar Angkor Thom di Kamboja.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Tugu Sebagai Ikon Yogya

BANYAK kota di negeri ini memiliki tugu dan semuanya tinggi besar. Mulai Tugu Monas Jakarta, Tugu Pahlawan Surabaya bahkan juga Tugu Muda Semarang. Hanya Tugu Yogya yang kecil tidak sebagaimana yang disebut sebelumnya. Yang menarik, justru hanya Tugu Yogya yng ikonik. Bahkan sepertinya menyebut ëTuguí langsung menghadirkan ingatan pada Tugu Yogya. Tak pelak, banyak yang memanfaatkan kemudian untuk selfie dan foto bersama di situ.

Dulu semasa kuliah di Yogya, bukan tidak terbersit keinginan berfoto di Tugu. Selain belum secanggih sekarang, foto di zaman dulu mahal, apalagi sebelum ada kamera digital. Maka ketika kemarin sempat singgah di Yogya sudah diniatkan untuk foto-foto di Tugu. Sayangnya, kehebatan Tugu tidak tampak dimalam hari. Apakah lampunya memang tidak ada atau matl? Kami kecewa. Karena kami baru tiba dinihari, siangnya ada kegiatan kunjungan sampai sore. Malamnya dari hotel sengaja ke Tugu ternyata suasana gelap. Besuk paginya kami sudah melanjutkan perjalanan tugas. Saya benar-benar kecewa. ❑

***Santika**, 08191035XXXX*

Hati-hati, Anak Kecanduan Gadget

ERA sekarang yang sudah digital, tentu ada sisi positif negatifnya. Positifnya, banyak hal bisa terbantu ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Namun negatifnya, kalau kita tidak memahami keperluannya secara benar. Sehingga asal memberi anak handphone atau gadget dan membiarkan melihat terus tayangan-tayangan yang ada. Mungkin orang tua atau orang dewasa yang memilihkan tayangannya. Namun sadarkah bila sampai anak kecanduan?

Banyak bahaya yang akan menghadang kelak. Karenanya, sudah banyak tayangan yang mengingatkan jangan sampai anak kecanduan tayangan tersebut. Membuat anak tidak memperhatikan lingkungan, lambat merespons dan sosialisasi dengan yang lain, bukanlah persoalan remeh untuk dibiarkan. Untuk itu, orang tua atau pengasuh jangan hanya membiarkan anak dengan tayangan tersebut tanpa memperhatikan tumbuhkembang anak. Tetap ajak anak mengenal alam lingkungan, ajak anak bersosialisasi dan batasi penggunaan gadget. Ajak anak bercerita, berbicara. Jangan menyesal di kelak kemudian. ❑

***Aniek MB**, kawasan Magelang Utara*

Banjir Rob dan Menjaga Lingkungan

Syahrul Kirom

KASUS banjir rob di Pelabuhan Tanjung Mas, cukup menghentak. Ancaman ini nyata. Dan bencana banjir rob dari air laut dapat juga membahayakan bagi warga daerah Tanjung Mas. Meluapnya air laut di tentu menganggu jalan di Semarang. Peristiwa banjir rob ini patut menjadi perhatian serius.

BMKG telah memberikan peringatan dini tentang gelombang tinggi yang akan terjadi di daerah wilayah pantai. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Timur-Selatan, dengan kecepatan angin berkiasar 5-15knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Selatan dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, Laut-Jawa. Gelombang tinggi 1,25-2,5 M berpeluang terjadi di Perairan Semarang Demak, Perairan Brebes-Pemalang, Pati Rembang, Perairan Jepara, Laut Jawa Bagian Tengah, perairan Kalimantan Tengah Bagian Barat, perairan Karimun Jawa.

Etika Lingkungan

Informasi tersebut bukan sekadar informasi. Namun dengan informasi tersebut semestinya mengajarkan masyarakat membangun kesadaran dalam menjaga etika lingkungan dan etika alam. Karena ini adalah sebuah paradigma baru dalam memahami alam. Alam sebagai sumber mata pencaharian dan tempat tinggal orang-orang, hendaknya tidak marah dengan mengeluarkan banjir dan bencana lainnya.

Franz Magnis Suseno dalam karyanya *Javanische Weisheit und Ethik* (1981) mengatakan, manusia Jawa adalah mikrokosmos (*jagad cilik*) yang keberadaanya sangat tergantung dengan makrokosmos (*jagad gedhe*.) Itu semua memberikan gambaran secara eksplisit, bahwa masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dengan alam.

Dalam konteks ini, disadari atau tidak, orang ñorang Jawa dalam berperilaku sangat mempertimbangkan moralitas pada kosmos. Karena itu, kaidah norma dan moral dalam membangun keselarasan sosial dan keselarasan alam ini perlu ditanamkan kembali. Pertama, prinsip hormat terhadap alam dan keselarasan itu perlu dilakukan kembali, upacara ritual *gugur gunung* yang sering dilaksanakan masyarakat Jawa. Ritual ini mempunyai tujuan dan maksud yang baik untuk menjaga keselamatan alam, dalam rangka untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Perlindungan

Kedua, berdasarkan pada proses dalam membentuk keselarasan dengan kosmos. Maka untuk menjamin keselamatan masyarakat Jawa, keselamatan disini bisa dinterpretasikan secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan bahkan perlindungan atas bencana alam. Ketiga, pandangan masyarakat Jawa terhadap lingkungan sangat positif. Mereka memanfaatkan alam secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri. Artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka.

Keempat, dalam semboyan *Hamemayu Hayuning Bawana* menyiratkan orang Jawa untuk selalu memperindah alam ini. Dengan cara melakukan kebersihan lingkungan yang kotor, memperbaiki alam yang rusak, atau mungkin hutan yang gundul untuk ditanami kembali.

Dengan demikian, masyarakat Jawa harus menyadari akan pentingnya menjaga kosmos ini sebagai bentuk kesetiaan dalam proses pemeliharaan alam. Karen alam dengan segala isi dan lingkungan harus diperhatikan dengan cara mengurangi sikap eksploitatif. Kita harus menjaga alam dengan isi dan jangan mengeksploitasi sumber daya alam dengan keserakahan. ❑

) **Syahrul Kirom MPhil, peneliti dan Alumnus Pascasarjana UGM*

Pojok KR

Calon haji asal Pati tiba di Madinah
-- Alhamdulillah, semoga sehat, lancar dan mabrur

***

Pengunjung Candi Borobudur dibatasi 1.200 perhari
-- Dengan harga tiket berubah, mungkinkah mencapai target?

***

Mahasiswa UGM ciptakan 'Eco-lindi'
-- Memeringati Hari Lingkungan dengan mengatasi persoalan lingkungan

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.